

TESIS

**KEDUDUKAN DAERAH ISTIMEWA DALAM NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA**

OLEH

FERRY KURNIAWAN

1220113036

Diajukan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Magister

Hukum



Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Yuslim, S.H., M.H.**

PROGRAM PASCA SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

KEDUDUKAN DAERAH ISTIMEWA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Ferry Kurniawan, 1220113036, Universitas Andalas, 146 Halaman, Tahun
2017

ABSTRAK

Selama Indonesia merdeka, kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat dinamis. Selama kurun waktu setengah abad lebih, Sistem Pemerintahan Daerah sarat dengan pengalaman yang panjang seiring dengan konfigurasi yang terjadi pada tataran Pemerintahan Negara. Pola hubungan kekuasaan, pembagian kewenangan, dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak dapat dipungkiri sangat bergantung pada konfigurasi politik pemerintahan pada saat itu. Realitas demikian tentu mempengaruhi formalitas penyelenggaraan pemerintahan-pemerintahan daerah dan pemberian otonomi daerah di Indonesia. Akan tetapi, terlepas dari semua pengaruh yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, semua kebijakan selalu dijiwai oleh kesatuan pandang yang sama, yaitu seluruh daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nanggroe Aceh Darussalam dan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Keistimewaan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta adalah berkaitan dengan kedudukan Kepala Daerahnya yang berasal dari keturunan raja atau sultan. Dan Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Dalam Sistem Negara Kesatuan yang dianut oleh Indonesia pemberian keistimewaan kepada daerah tersebut tentunya menimbulkan polemik karena adanya perbedaan perlakuan dengan daerah-daerah lain pada umumnya. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder serta teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kedudukan Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pemberian dari Para *Founding Fathers* karna mengingat asal-usul dan peranan daerah tersebut pada saat merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Perlakuan itu harus tetap dijaga selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Negara Kesatuan, Otonomi Daerah, Daerah Istimewa.

**SPECIALIZED REGIONS IN THE UNITARY STATE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**

Ferry Kurniawan, 1220113036, University of Andalas, 146 Page, Year 2017

ABSTRACT

As long as the independence of Indonesia, the policy of local governance has experience dynamic changes and developments. Over the course of a period of over a half century, the Local Governance System is loaded with long experience along with the configuration that occurs at the level of State Government. The pattern of power relations, the division of authority, and the financial balance between the Central Government and the Regional Government is highly dependent on the political configuration of government at the time. Its affects the formalities of local governance and the provision of regional autonomy in Indonesia. However, apart from all the influences that arise in the implementation of local government, all policies are always inspired by the same point of view, that is the whole region is an integral part of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The Article 18B of the 1945 Constitution make it clear that the state recognizes and respects special regional government units regulated by law. Nanggroe Aceh Darussalam and Daerah Istimewa Yogyakarta are special areas recognized by the 1945 Constitution. Privileges possessed by the Special Territory of Yogyakarta is related to the position of the Head of Region derived from the descendants of the king or sultan. And Nanggroe Aceh Darussalam has privileges in the administration of government based on Sharia Law. In the Unitary State System adopted by Indonesia the granting of privileges to the area certainly raises a polemic because of differences treatment with other areas in Indonesia. In this writing the author uses normative juridical research methods, while the data used is secondary data and data collection techniques in the form of literature study. From the results of this study concluded that the position of the Special Region in the Unitary State of the Republic of Indonesia is a gift from the Founding Fathers because considering the origin and role of the area when Indonesia independence movements. The treatment must be maintained as long as it does not contradicting with the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: State of Unity, Regional Autonomy, Special Region.